

**PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN
FRAUD PADA PT. BANK SINARMAS TBK.**

SKRIPSI

NANANG RAHAYU WIDODO
NIM : 14622269



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

**PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN
FRAUD PADA PT. BANK SINARMAS TBK.**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh :

NANANG RAHAYU WIDODO
NIM : 14622269

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANANG RAHAYU WIDODO
NIM : 14622269
Tahun Angkatan : 2014
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.21
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata – 1 (Satu)
Judul Skripsi : PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DAN PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA
PT. BANK SINARMAS TBK.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tanjungpinang, Mei 2020
Penyusun,

NANANG RAHAYU WIDODO
NIM : 14622269

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*
PADA PT. BANK SINARMAS Tbk.

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

NANANG RAHAYU WIDODO
NIM : 14622269

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 1004117701 / Lektor

Nurfitri Zulaika, SE.M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1020118901/Asisten Ahli

Mengetahui
Plt. Ketua Program Studi

Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*
PADA PT. BANK SINARMAS Tbk.

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

NANANG RAHAYU WIDODO
NIM : 14622269

Telah dipertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian
Pada Hari Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua

Sekretaris

Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 1004117701 / Lektor

Nurfitri Zulaika, SE.M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1020118901 / Asisten Ahli

Anggota

Hendi Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Tanjungpinang, 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Ketua,

Charly Marlinda, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801/Lektor

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, Devi yulianti dan orang terdekat saya yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih saya ucapkan untuk perusahaan bank sinarmas yang sudah mengizinkan saya meneliti di perusahaan nya dan terimakasih atas pemberian gajinya sehingga saya bisa kuliah dan menyelesaikannya, untuk teman-teman karyawan dan outsourcing bank sinarmas saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih sudah memberikan semangat dari awal kuliah sampai saya selesai

Hai kawan-kawan ku Akuntansi M3.....

Dimana pun kalian sekarang saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas kerja sama kalian dari awal kuliah sampai selesai perkuliahan ini sehingga saya menuliskan ini untuk kalian kawan-kawan ku, semoga kalian sukses dengan kehidupan kalian masing-masing ya.

Untuk kenny lim yang sangat membantu saya selama kuliah saya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya dan di mana kamu sekarang semoga kamu juga sukses ken.

Yang saya hormati para dosen ku, dosen pembimbing dan almamaterku

Dedikasi yang begitu besar yang sudah kalian berikan untuk kampus dan dunia pendidikan terutama jurusan akuntansi. Ibu Ranti utami selaku dosen pembimbing satu, Ibu Nurfitri Zulaika selaku dosen pembimbing dua dan Bpk hendi satria selaku dosen penelaah di sidang skripsi saya, saya ingin mengucapkan banyak terimakasih pak buk, terimakasih juga atas bimbingannya maaf kan saya jika selama bimbingan sudah banyak merepotkan ibu

MOTTO

*Bermimpilah seakan kau akan hidup
selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati
hari ini.*

~James Dean~

*“Yakin adalah kunci jawab dari segala
permasalahan.
Yang bermodal yakin merupakan obat
mujarab penumbuh semangat
Hidup “*

(penulis)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata I Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul **“PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PT. BANK SINARMAS TBK.”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan ada kekurangan. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini, terutama pada :

1. Ibu CharlyMarlinda, SE.,M.Ak.Ak. CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.Ak. CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang perhatian mengingatkan dan meluangkan waktunya membimbing penulis.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.,M.Si.Ak. CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
4. Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Plt. Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Masyitah As Sahara, SE., M.Ak selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Nurfitri Zulaika, SE.M.Ak.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu memberikan masukan kepada penulis.

7. Seluruh Dosen dan Staff di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang sangat membantu dalam perkuliahan.
8. Pimpinan beserta Staff PT. Bank Sinarmas, Tbk. yang telah memberikan izin kepada penulis serta telah memberikan partisipasinya dalam penelitian ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi dunia pendidikan. Dan semoga Allah SWT memberikan ridha dan membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Tanjungpinang, Mei 2020

Penyusun

NANANG RAHAYU WIDODO

NIM : 14622269

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	7
1.6. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Teori	
2.1.1 Pencegahan <i>Fraud</i>	9
2.1.2 <i>Whistleblowing</i>	13
2.1.3 Pengendalian Internal	20
2.2. Kerangka Pemikiran	25
2.3. Pengaruh Antar Variabel	26
2.4. Hipotesis	27
2.5. Penelitian Terdahulu	27

BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Jenis Data	33
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4. Populasi dan Sampel	34
3.4.1 Populasi	34
3.4.2 Sampel	35
3.5 Defenisi Operasional Variabel	35
3.6 Teknik Pengolahan Data	37
3.7 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Hasil Penelitian	48
4.1.1 Gambaran Umum PT. Bank Sinarmas Tbk	48
4.1.2 Karakteristik Responden	49
4.1.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis	
Kelamin	49
4.1.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur ..	50
4.1.3 Pengujian Instrumen Penelitian	50
4.1.3.1 Uji Validitas.....	50
4.1.3.2 Uji Reliabilitas	52
4.1.4 Deskripsi Jawaban Responden	53
4.1.4.1 Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	53
4.1.4.2 <i>Whistleblowing</i> (X1)	53
4.1.4.3 Pengendalian Internal (X2)	54
4.1.5 Uji Asumsi Klasik	55
4.1.5.1 Uji Normalitas	55
4.1.5.2 Uji Multikolinieritas	57
4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas	58
4.1.5.4 Uji Autokorelasi	59

4.1.6	Analisis Regresi Linier Berganda	60
4.1.7	Uji Hipotesis	62
4.1.7.1	Hasil Uji T-Test	62
4.1.7.2	Hasil Uji F-Test	63
4.1.8	Uji Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>)	65
4.2.	Pembahasan	66
4.2.1	Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	66
4.2.2	Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	67
4.2.3	Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	68
BAB V	PENUTUP	69
5.1.	Kesimpulan	69
5.2.	Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Daftar Populasi Penelitian.....	35
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel.....	36
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	50
Tabel 4.3	Pengujian Validitas Variabel Penelitian	51
Tabel 4.4	Pengujian Reliabilitas Variabel Penelitian	52
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Variabel Pencegahan <i>Fraud</i>	53
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Variabel <i>Whistleblowing</i>	54
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Variabel Pengendalian Internal	54
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinearitas	58
Tabel 4.9	Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.10	Analisa Perhitungan Regresi	60
Tabel 4.11	Hasil Uji T.....	62
Tabel 4.12	Hasil Uji Simultan Dengan F- Test.....	64
Tabel 4.13	Hasil Pengujian Untuk Uji Koefisien Determinasi (R Square).....	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Rekapitulasi Tanggapan Responden
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Plagiarism

A B S T R A K

PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PT. BANK SINARMAS Tbk.

Nanang Rahayu Widodo. 14622269. Akuntansi.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Email : nanangrahayuwidodo@yahoo.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Whistleblowing System* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif.

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan SPSS dengan pengujian instrumen penelitian, pengujian asumsi klasik, regresi linier serta pengujian hipotesis. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 39 orang yang merupakan Karyawan pada PT. Bank Sinarmas Tbk. cabang Tanjungpinang dan Batam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*, Pengendalian internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*. *Whistleblowing System* dan Pengendalian Internal memiliki pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pegawai hal ini didasarkan dari Uji signifikansi simultan

Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel *Whistleblowing System* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* adalah sebesar 84,9%, sedangkan sisanya sebesar 15,1% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian seperti sistem informasi akuntansi, asimetri informasi dan audit.

Kata Kunci : *Whistleblowing*, Pengendalian Internal, *Fraud*

Dosen Pembimbing I : Ranti Utami, SE.,M.Si.Ak. CA

Dosen Pembimbing II : Nurfitri Zulaika, SE.M.Ak.Ak.CA

A B S T R A C T

THE EFFECT OF WHISTLEBLOWING SYSTEM AND INTERNAL CONTROL OF FRAUD PREVENTION IN PT. BANK SINARMAS Tbk.

NANANG RAHAYU WIDODO. 13622028. Akuntansi.Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Email : nanangrahayuwidodo@yahoo.com

The purpose of this study was to determine the effect of whistleblowing system and internal control on fraud prevention. The research method used in this study is a quantitative research method.

Data analysis was performed quantitatively using SPSS with research instrument testing, classical assumption testing, linear regression and hypothesis testing. The sample in this study amounted to 39 people who are employees at PT. Bank Sinarmas Tbk. Tanjungpinang and Batam branches.

The results showed that the Whistleblowing System has an effect on Fraud Prevention, Internal control has a bearing on Fraud Prevention. Whistleblowing System and Internal Control have an influence on employee Fraud Prevention based on simultaneous significance test.

The magnitude of the influence exerted by the Whistleblowing System and Internal Control variables on Fraud Prevention is 84.9%, while the remaining 15.1% is influenced by other factors not examined in research such as accounting information systems, information asymmetry and auditing.

Keywords : Whistleblowing, Internal Control, Fraud

Advisor I : Ranti Utami, SE., M.Sc.Ak. CA.

Advisor II : Nurfitri Zulaika, SE.M.Ak.Ak.CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya perekonomian di era globalisasi saat ini mendorong seluruh sektor industri berada dalam sebuah persaingan. Meningkatnya persaingan di dalam sektor industri menyebabkan perusahaan harus berusaha keras dan menggunakan segala cara agar mampu bertahan. Keadaan tersebut mengakibatkan peluang terjadinya pelanggaran seperti *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum di dalam perusahaan yang bersangkutan meningkat. Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian demi menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci memelihara stabilitas industri perbankan, kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank.

Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai lembaga intermediasi dan penyediaan jasa-jasa bank. Sedangkan untuk perkembangan dunia perbankan semakin pesat. Perbankan adalah kumpulan lembaga keuangan yang mempunyai ijin sebagai bank yang dapat menerima simpanan dan produk atau jasa bank yang mengatur perekonomian suatu Negara. Saat ini dunia perbankan sangat ketat dengan persaingan.

Di dalam melaksanakan kegiatannya, tidak bisa dipungkiri jika dalam suatu perusahaan akan terjadi tindakan *fraud*. *Fraud* (kecurangan) merupakan

perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam organisasi untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau sekelompok golongan tertentu. *Fraud* sebagai suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan dengan cara kekerasan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. *Fraud* juga dapat dikatakan sebagai tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga yang menghasilkan adanya kekeliruan dalam laporan keuangan. *Fraud* juga dapat dilihat sebagai kekeliruan yang disengaja, menyembunyian, atau kebenaran yang disalahgunakan untuk tujuan penipuan atau manipulasi yang merugikan keuangan individu atau organisasi yang juga mencakup penggelapan, pencurian, atau upaya apapun untuk mencuri atau secara tidak sah memperoleh dan menyalahgunakan atau membahayakan aset organisasi.

Bank sendiri merupakan sebuah organisasi yang menerapkan proses manajemen dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu proses manajemen yang diterapkan oleh bank adalah proses pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan sebuah bank bergerak sesuai dengan tujuannya. Apabila terjadi pelanggaran yang dapat menghambat tercapainya tujuan bank, maka seluruh karyawan khususnya manajer bertugas mengatasi dan meluruskan pelanggaran tersebut. Untuk itu, pihak bank harus menggunakan cara atau metode yang tepat dalam menangani sebuah pelanggaran. Salah satu cara atau metode yang dapat digunakan manajer bank yaitu dengan menerapkan sistem *whistleblowing*. *Whistleblowing* merupakan cara yang tepat untuk mencegah terjadinya kasus

kecurangan terjadi pada pelaporan keuangan yang merugikan perusahaan sendiri atau pihak lain. *Whistleblowing* merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Upaya selanjutnya dalam pencegahan kecurangan dapat dilakukan pengendalian internal secara berkelanjutan. Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting bagi perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian intern perusahaan tersebut akan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan seperti terciptanya lingkungan pengendalian yang baik. Tanpa adanya sistem pengendalian internal, tujuan-tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan maka sistem pengendalian internnya juga semakin penting bagi perusahaan. Pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai pedoman dan prosedur operasional perusahaan ataupun organisasi tertentu di sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan menggunakan sistem pengendalian intern umumnya untuk mencegah penyalahgunaan sistem dan untuk mengarahkan operasi perusahaan. Tanggungjawab atas adanya sistem pengendalian intern yang baik terletak pada manajemen. Manajemen mempunyai tugas atas perancangan dan penetapan sistem pengendalian intern, selain itu manajemen juga harus melakukan pengawasan terhadap pengendalian intern yang sedang berjalan. Maka hal ini menimbulkan masalah bagi manajemen apakah pengendalian intern

berjalan secara efektif seperti yang diharapkan oleh manajemen. Selain dengan deteksi dini (evaluasi kembali) untuk meminimalisir kecurangan, Bank bisa menerapkan sistem pengendalian intern untuk meminimalisir kecurangan.

PT Bank Sinarmas, Tbk. adalah perusahaan swasta yang merupakan salah satu anak perusahaan raksasa Sinarmas Group yang bergerak di perbankan, dimana perbankan yang memiliki banyak produk layanan yang dapat membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi bagi nasabah, salah satunya dalam hal permodalan dan pengembangan usahanya yang dapat dijumpai pada produk pembiayaan mikro yang dikhususkan untuk pinjaman uang kepada nasabah kalangan menengah dan menengah ke bawah PT Bank Sinarmas, Tbk. Cabang Tanjungpinang dan Batam merupakan pemilihan lokasi penelitian dalam penelitian ini yang memiliki unit kerja mikro.

Adapun fenomena terkait permasalahan penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaporan keuangan terutama pada tutup buku setiap harinya sering terjadi selisih perhitungan oleh karyawan, dapat diketahui juga hal ini sering sekali berulang terjadi. selanjutnya kurang ditanggapinya aduan dari pihak internal yang memberikan informasi berkenaan dengan *fraud* sehingga kecenderungan kecurangan sering berulang terjadi. Berdasarkan dari data yang didapatkan diketahui bahwa kecenderungan kecurangan yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 terdapat 9 kasus terjadinya *Fraud* hal ini berkaitan dengan pelanggaran kode etik karyawan, serta kecurangan atas pengajuan fasilitas kredit yang tersedia pada PT. Bank Sinarmas, Tbk. cabang Tanjungpinang dan Batam.

Hasil pengamatan sementara dapat diketahui bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal dalam menangani kecurangan yang terjadi merupakan penyebab berulangnya kasus yang dilakukan oleh pihak internal sendiri. Dapat diketahui belum adanya kepastian auditor internal dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, serta belum terstrukturnya program kerja dari pihak pengendalian internal dalam mengaudit keuangan perusahaan. Terkait hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan pada bank Sinarmas Cabang Tanjungpinang dan Batam adalah dengan memberlakukan *Whistleblowing System* yang selama ini belum diketahui secara jelas oleh pihak perusahaan sehingga dampak yang ditimbulkan kurang berjalannya fasilitas *Whistleblowing system* pada PT. Bank Sinarmas, Tbk.

Berdasarkan dari hasil pengamatan sementara yang dilakukan dapat diketahui fenomena tersebut berulang kali terjadi dan hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pihak PT. Bank Sinarmas Tbk. untuk dapat melakukan upaya pencegahan tindak kecurangan yang terjadi. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat dibuat suatu judul usulan penelitian dengan judul:

“Pengaruh *Whistleblowing System* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT. Bank Sinarmas Tbk.”

1.2 Rumusan Masalah

Untuk itu dalam penyusunan penelitian ini, dirumuskan masalah sebagai dasar kajian penelitian yang dilakukan seperti:

1. Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT. Bank Sinarmas Tbk.?
2. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT. Bank Sinarmas Tbk.?
3. Apakah *Whistleblowing System* dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT. Bank Sinarmas Tbk.?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian bertujuan agar penelitian dapat difokuskan sesuai dengan variabel dan lokasi yang ditentukan, sehingga dapat diketahui batasan penelitian dalam penelitian ini yaitu berada pada lokasi PT. Bank Sinar Mas Tbk. Tanjungpinang dan PT. Bank Sinar Mas Tbk. Batam.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT. Bank Sinarmas Tbk.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT. Bank Sinarmas Tbk.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Whistleblowing System* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT. Bank Sinarmas Tbk.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana keterkaitan antara *Whistleblowing System* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT. Bank Sinarmas Tbk.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk Bank Sinarmas Cabang Tanjungpinang dalam Pengelolaan Keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan landasan teori berupa penjabaran teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis serta sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian lainnya. Bab ini juga akan menjelaskan tentang

kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti serta hipotesis yang timbul dari pemikiran tersebut.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisikan deskripsi bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional. Bab ini akan berisikan variabel penelitian dan definisi operasional variabel penelitian penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV Analisa Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan analisa pembahasan mengenai variabel penelitian

BAB V Penutup

Berisi uraian simpulan, keterbatasan, implikasi teoritis, implikasi manajerial dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pencegahan *Fraud*

Istilah *fraud* (Inggris) atau *fraude* (Belanda) sering diterjemahkan sebagai kecurangan, (ACFE, 2017) sering juga kecurangan (*fraud*) secara sederhana diartikan dengan ketidak-jujuran.

Association of Certified Fraud Examiners dalam (Kasmir, 2014) mengkatégorikan kecurangan (*fraud*) menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Korupsi (*Corruption*). Korupsi didefinisikan sebagai “*Spoiled; tainted; depraved; debased; morally degenerate*. Skema korupsi (*corruption schemes*) dapat dipecah menjadi empat klasifikasi: (1) pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), (2) suap (*bribery*), (3) pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan (4) pemerasan ekonomi (*economic extortion*)”.
2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*). Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) penyalahgunaan kas (*cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk *skimming, larceny* atau *fraudulent disbursements*, dan (2) penyalahgunaan non-kas (*non-cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan (*misuse*) atau pencurian (*larceny*) terhadap persediaan dan aset-aset lainnya.
3. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*). Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement schemes*)

dapat dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan (1) mencatat pendapatan-pendapatan fiktif (*fictitious revenues*), (2) mencatat pendapatan (*revenue*) dan/atau beban (*expenses*) dalam periode yang tidak tepat, (3) menyembunyikan kewajiban dan beban (*concealed liabilities and expenses*) yang bertujuan untuk mengecilkan jumlah kewajiban dan beban agar perusahaan tampak lebih menguntungkan, (4) menghilangkan informasi atau mencantumkan informasi yang salah secara sengaja dari catatan atas laporan keuangan (*improper disclosures*), atau (5) menilai aset dengan tidak tepat (*improper asset valuation*).

(Suwardjono, 2014) menyebutkan bahwa terdapat tiga kondisi mengapa seseorang melakukan *fraud* yang kemudian disebut dengan *fraud triangle*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga kondisi (*fraud triangle*) adalah sebagai berikut :

1. Tekanan (*Pressures*). Terdapat tekanan yang berbeda yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan *fraud*. (Loebbecke, 2012) mendefinisikan *perceived pressures* sebagai situasi dimana manajemen atau karyawan memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
2. Kesempatan (*opportunities*). Kesempatan (*opportunities*) adalah situasi dimana seseorang percaya bahwa dia memiliki keadaan yang menjanjikan atau memungkinkan untuk melakukan *fraud* dan tidak dapat terdeteksi yang menyebutkan bahwa kesempatan untuk melakukan atau menyembunyikan *fraud* harus ada agar *financial statement fraud* dapat

terjadi. Kesempatan dapat timbul akibat kurangnya pengawasan dewan direksi maupun komite audit, pengendalian internal yang lemah, transaksi yang tidak biasa ataupun rumit, estimasi akuntansi yang membutuhkan penilaian subjektif yang signifikan, dan staf audit internal yang tidak efektif. Pada umumnya *fraud* tidak berhasil dilakukan pada organisasi yang memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, dan para karyawan yang menyadari bahwa pengendalian-pengendalian tersebut dibuat untuk mencegah *fraud*.

3. Rasionalisasi (*rationalization*). Rasionalisasi adalah hadirnya sebuah perilaku, karakter, atau kumpulan nilai etis yang membiarkan manajemen atau karyawan secara sengaja melakukan sebuah tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang membebankan tekanan yang cukup yang menyebabkan mereka untuk merasionalisasikan atau membenarkan sebuah tindakan yang tidak jujur.

Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi *fraud* disebutkan dalam SA Seksi 110 (PSA No.01), Ikatan Akuntan Indonesia (2011) bahwa: Auditor bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan.

(Widyaiswara, 2010) menjelaskan bahwa tidak ada instansi yang akan mampu membangun suatu program dan pengendalian untuk meminimalkan *fraud* tanpa mampu mengidentifikasi risiko yang harus diatasi atau diminimalkan.

Namun demikian jarang sekali instansi yang telah memiliki gugus tugas (*task force*) untuk menilai risiko *fraud*. Penilaian risiko *fraud* merupakan tonggak penting dalam program anti-*fraud* untuk mengantisipasi (bukan sekedar bereaksi atas) terjadinya *fraud* dan penyalahgunaan wewenang. Instansi yang tidak menjalankan penilaian atas risiko *fraud*, umumnya juga jarang mengkaitkan antara aktivitas pengendalian *preventif* dan detektif untuk meminimalkan risiko *fraud* yang teridentifikasi. Apabila penilaian risiko *fraud* telah ditetapkan maka instansi diminta untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menguji desain efektifitas program pengendalian anti-*fraud*.

Meskipun audit dan monitoring merupakan bagian integral dari kerangka kerja SPIP, instansi publik umumnya jarang melakukan audit dan pemantauan khususnya yang terkait dengan *fraud*. Melalui program fasilitasi oleh internal audit, program monitoring *fraud* merupakan bagian dari aktivitas operasi sehari-hari. Sebagai tambahan, bagian internal audit harus menuangkan program penilaian risiko dalam rencana kerja tahunannya.

(Halim, 2012) menambahkan bahwa penilaian risiko *fraud* yang efektif akan dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang tidak terdeteksi dan memperkuat kemampuan organisasi dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* serta penyalahgunaan sebelum menjadi skandal bagi instansi. Selain itu penilaian risiko *fraud* dapat mengidentifikasi penghematan biaya yang timbul dibandingkan dengan biaya penilaian secara langsung. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penilaian risiko *fraud* menurut (Nurhayati, 2017) mencakup:

1. Mengorganisasikan penilaian risiko berdasarkan siklus tugas pokok dan fungsi instansi atau siklus kemungkinan terjadinya *fraud*.
2. Menetapkan unit dan lokasi untuk dinilai.
3. Mengidentifikasi skema dan skenario potensi terjadinya *fraud* dan penyalahgunaan wewenang.
4. Menilai kemungkinan terjadinya dan tingkat signifikansi risiko.

2.1.2 Whistleblowing

(Rusnindita, Rosidi, & Baridwan, 2017) *whistleblowing* didefinisikan sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja.

Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah. (Susilawati & Atmawinata, 2014).

Menurut Staley dan Lan dalam (Akmal, 2009) mengatakan bahwa *whistleblowing* adalah cara yang tepat untuk mencegah dan menghalangi kecurangan, kerugian, dan penyalahgunaan. Peters dan Branch dalam (Akmal, 2009) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai pengungkapan oleh seseorang mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat bekerja.

Dari beberapa pengertian *whistleblowing* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing* merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengungkap atau melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan atau tindakan yang melawan hukum yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. Elias dalam Krehastuti (2014) menyatakan bahwa *whistleblowing* dapat terjadi dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*external*). *Internal whistleblowing* dapat terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Sedangkan *external whistleblowing* terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan dan kemudian memberitahukannya kepada masyarakat karena kecurangan tersebut akan merugikan masyarakat.

Whistleblower adalah seseorang yang mengungkap atau melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan (*whistleblowing*). Pada dasarnya *whistleblower* adalah karyawan dari organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. *Whistleblower*

biasanya mempunyai data atau bukti yang memadai terkait tindakan yang melawan hukum tersebut. Peran *whistleblower* sangatlah penting dalam mengungkap suatu tindakan melawan hukum di dalam internal organisasi.

Peran *wistleblower* sebagai salah satu bentuk pengawasan kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan *whistleblower* dapat diperankan oleh siapa saja yang mengetahui tindak kecurangan dalam organisasi. Namun, banyak orang yang takut untuk mengadukan tindak kecurangan, karena tak sedikit risiko yang harus dihadapi, bahkan sulit dihindari dan solusinya mereka lebih memilih untuk diam. Mulai dari pemecatan pihak organisasi tempat ia bekerja dan ancaman terlapor pada dirinya dan keluarganya. Jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* juga sudah ada sejak tahun 2006 dengan lahirnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut merupakan salah satu pendorong atau motivasi seseorang untuk menjadi *whistleblower*.

Seorang *whistleblower* dalam upaya mengungkap suatu tindak pelanggaran dan kecurangan, baik di perusahaan atau suatu lembaga pemerintahan, memang dapat dilatarbelakangi berbagai motivasi, seperti pembalasan dendam ingin “menjatuhkan” perusahaan tempatnya bekerja, mencari “selamat”, atau niat untuk menciptakan lingkungan perusahaan tempatnya bekerja menjadi lebih baik dan lebih beretika. Yang jelas seorang *whistleblower* memiliki motivasi pilihan etis yang kuat untuk berani mengungkap skandal kejahatan terhadap publik. *Whistleblower* memiliki suara hati yang memberi petunjuk kuat mengenai pentingnya sebuah skandal untuk diungkap. (LPSK, 2011).

Sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa mengenai kriteria kecurangan yang dilaporkan yang meliputi 5W+1H, tindak lanjut dari laporan tersebut, *reward* dan perlindungan bagi sang pelapor atau *whistleblower*, dan hukuman atau sanksi untuk terlapor. Sistem ini merupakan wadah atau saluran bagi *whistleblower* untuk mengungkap dan melaporkan tindak kecurangan. Sistem ini dibentuk oleh Komite Audit perusahaan dan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: IX .1.5 yang mewajibkan Komite Audit untuk menangani pengaduan, dan Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section 310 tentang *Public Company Audit Committee* yang mengharuskan Komite Audit untuk menerima, menelaah, dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan masalah akuntansi, pengendalian internal, dan auditing, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini dilakukan tujuan untuk mendeteksi, meminimalisir dan kemudian menghilangkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan pihak internal organisasi.

Menurut (Zimbelman, 2009), program *whistleblowing* yang baik dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa *whistleblowing system* yang efektif harus memenuhi 4 elemen berikut:

1. Anonimitas

Sebuah sistem yang baik harus merahasiakan identitas seorang *whistleblower*, karena tanpa rasa takut untuk melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan di dalam organisasi. Ketika sebuah laporan

tersebut merupakan bagian dari sebuah kejahatan, maka dapat memudahkan untuk menginvestigasi pelanggaran yang dilaporkan.

2. Independensi

Seorang karyawan akan merasa nyaman jika pelanggaran yang ia laporkan ditindaklanjuti oleh pihak yang independen, artinya tidak ada hubungan dengan pihak organisasi maupun pihak yang melakukan pelanggaran.

3. Akses yang mudah

Karyawan harus mempunyai beberapa saluran untuk melaporkan tindak pelanggaran. Diantaranya dapat melalui telepon, *e-mail*, sistem online, dan *faximile*. Hal ini menjamin semua karyawan (dari manajer puncak hingga buruh) bias dengan merahasiakan namanya untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui saluran-saluran tersebut.

4. Tindak lanjut

Pelanggaran yang dilaporkan melalui *whistleblowing system* kemudian ditindaklanjuti untuk menentukan tindakan yang diperlukan dalam menyelidiki suatu pelanggaran. Hal ini akan menunjukkan manfaat dari sistem tersebut dan dapat mendorong karyawan untuk lebih aktif lagi melaporkan tindak pelanggaran.

Adapun beberapa manfaat dari penyelenggaraan *whistleblowing system* yang baik menurut KNKG, antara lain:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan kecurangan, dengan semakin

meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya kecurangan, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.

3. Tersedianya mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum dan,
8. Memberikan masukan kepada perusahaan untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Menurut KNKG (Lusiani, 2009) sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang baik memberikan fasilitas dan perlindungan (*whistleblower protection*) sebagai berikut:

1. Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email);
2. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor;
3. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau perusahaan;
4. Informasi tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan.

Menurut (LPSK, 2011) mekanisme *whistleblowing* adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan terjadi dalam suatu perusahaan. Di dalam perusahaan umumnya terdapat 2 cara sistem pelaporan agar dapat berjalan dengan efektif, adapun 2 cara sistem pelaporan tersebut, yaitu:

1. Mekanisme Internal

Sistem pelaporan internal umumnya dilakukan melalui saluran komunikasi yang sudah baku dalam perusahaan. Sistem pelaporan internal *whistleblower* perlu ditegaskan kepada seluruh karyawan. Dengan demikian, karyawan dapat mengetahui otoritas yang dapat menerima laporan. Berbagai bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan karyawan yang berperan sebagai *whistleblower*, misalnya: perilaku tidak jujur yang berpotensi atau yang mengakibatkan kerugian finansial perusahaan; pencurian uang atau aset; perilaku yang mengganggu atau merusak keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan kesehatan.

Aspek kerahasiaan identitas *whistleblower*, jaminan bahwa *whistleblower* mendapat perlakuan yang baik, seperti tidak diasingkan atau dipecat, perlu dipegang oleh pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris sangat penting. Pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris juga berperan sebagai orang yang melindungi *whistleblower*.

2. Mekanisme Eksternal

Dalam sistem pelaporan secara eksternal diperlukan lembaga di luar perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan

whistleblower. Lembaga ini memiliki komitmen tinggi terhadap perilaku yang mengedepankan standar legal, beretika, dan bermoral pada perusahaan. Lembaga tersebut bertugas menerima laporan, menelusuri atau menginvestigasi laporan, serta memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Lembaga tersebut berdasarkan UU yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus *whistleblowing*, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Polri, dan Komisi Kejaksaan.

Dengan demikian, pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan atau kebijakan. Motif seseorang sebagai *whistleblower* dapat bermacam-macam, mulai dari motif itikad baik menyelamatkan perusahaan, persaingan pribadi atau bahkan persoalan pribadi. Bagi pengembangan sistem ini yang terpenting adalah seseorang tersebut melaporkan untuk mengungkap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di perusahaannya bukan motifnya. Jika *whistleblower* sudah melaporkan ke lembaga yang berwenang, seorang *whistleblower* perlu mendapatkan perlakuan yang baik. Perlakuan yang baik itu meliputi adanya jaminan perlindungan terhadap aksi balas dendam, seperti pemecatan.

2.1.3 Pengendalian Internal

Pengawasan intern merupakan kebijakan dari prosedur spesifikasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa

sasaran dan tujuan penting bagi manajemen perusahaan dapat dipenuhi. (Setyawan, 2009) memberikan definisi terhadap pengawasan intern sebagai berikut “ Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen “.

Dari defenisi ni dapat diketahui bahwa pengawasan intern tidak terbatas hanya pada rencana organisasi, namun juga prosedur dan catatan yang berkaitan dengan proses keputusan yang mengarah kepada otorisasi manajemen yang secara langsung berhubungan dengan tanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian di atas secara garis besar mengelompokkan metode dan tujuan-tujuan struktur pengawasan intern menjadi dua bagian besar.

Tujuan pertama merupakan tujuan dari salah satu bagian pengawasan intern, yang sering disebut pengawasan intern akuntansi, yaitu menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Sedangkan tujuan kedua adalah bagian dari pengawasan intern lainnya yang dikenal dengan pengawasan intern administras, yaitu memajukan efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian pengawasan intern menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) disebutkan : “Pengawasan Intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas - yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu (a) keandalan pelaporan keuangan,

(b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku “.

Sesuai pendapat Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (2011) dinyatakan bahwa pengendalian intern terdiri dari 5 komponen yang saling terkait yaitu :

1. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
2. Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
3. Aktivas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
4. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
5. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu

Istilah pengawasan intern banyak dibahas dalam auditing. Untuk mengetahui sistem pengawasan intern yang baik tidak hanya dapat ditinjau dari satu sisi. Pengawasan intern atau lebih luasnya sistem pengawasan manajemen merupakan keseluruhan paket, metode dan prosedur yang dianut oleh manajemen

dalam suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan perusahaan yang diembannya. Definisi sistem pengawasan intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengawasan intern tersebut di atas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer.

Menurut Dasaratha V. Rama dan Frederick L. Jones dalam Slamet, M. (2009) memberikan definisi sebagai berikut : “Pengendalian intern (*internal control*) mencakup kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian atau korupsi, dan untuk memelihara keakuratan data keuangan”.

Model COSO adalah salah satu model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh para auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi, mengembangkan pengendalian intern (Kusuma, 2014). COSO menyebutkan bahwa terdapat lima komponen pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan atau pemantauan.

1. Lingkungan pengendalian

Hal ini mencakup etika, Kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi.

2. Penentuan risiko

Penentuan risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko.

3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal, dan audit internal.

4. Informasi dan komunikasi

Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola, perasinya.

5. Pengawasan atau pemantauan

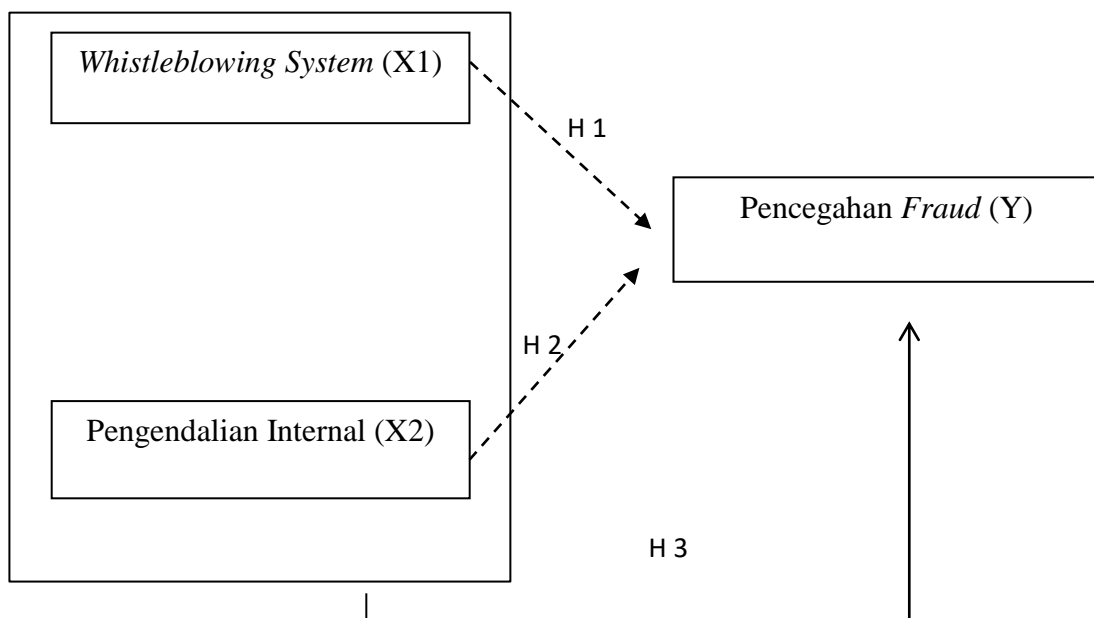
Pengawasan atau pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen pengendalian. Kegiatan utama dalam pengawasan meliputi supervisi yang efektif, akuntansi pertanggungjawaban, pengauditan internal.

Berdasarkan pengertian yang disebutkan di atas tujuan struktur pengendalian intern tersebut diharapkan agar dapat memberikan keyakinan mengenai suatu keandalan dan keakuratan dari laporan keuangan yang akan disajikan kepada segala pihak, atas terlaksananya kegiatan perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu agar dapat memberikan keyakinan kepada seluruh pihak yang terkait maupun tidak bahwa perusahaan telah melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku umum. Menurut (Setyawan, 2009), ada empat tujuan sistem pengawasan intern, yaitu :

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.2 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : konsep yang disesuaikan untuk penelitian, 2019

Keterangan :

- > : Uji Parsial
- > : Uji Simultan

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Keberadaan *whistleblowing system* tidak hanya sebagai saluran pelaporan kecurangan yang terjadi, namun juga sebagai bentuk pengawasan. Karyawan menjadi takut untuk melakukan kecurangan karena sistem ini bisa digunakan oleh seluruh karyawan, sehingga sesama karyawan menjadi saling mengawasi satu sama lain dan takut untuk dilaporkan karyawan lain karena melakukan kecurangan. Dengan demikian, pemahaman karyawan tentang mekanisme *whistleblowing* membuat karyawan menjadi antusias dalam melaporkan segala tindak kecurangan kepada otoritas yang berwenang menangani laporan tersebut karena *whistleblowing system* sudah mencakup *whistleblower protection*. Hal ini dapat mencegah *fraud* yang akan terjadi di perusahaan. Hal tersebut di atas sejalan dengan penelitian (Libramawan, 2014) yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

2.3.2 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Salah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya *fraud* adalah pengendalian internal. Karyono (2013, 47) menjelaskan tentang hubungan pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* sebagai berikut: Pencegahan *fraud* pada bab ini, yang utama ialah dengan menetapkan sistem pengendalian intern dalam setiap aktivitas organisasi. Pengendalian intern itu agar dapat efektif mencegah *fraud* harus andal dalam rancangan struktur pengendaliannya dan praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh (Tessamonica, 2015) dimana hasil penelitian membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan dari landasan teoritis serta kerangka pemikiran, maka dalam penelitian ini dapat dibuat suatu hipotesis yaitu :

H1 : Terdapat pengaruh antara *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT. Bank Sinarmas Tbk.

H2 : Terdapat pengaruh antara Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT. Bank Sinarmas Tbk.

H3 : Terdapat pengaruh antara *Whistleblowing* dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT. Bank Sinarmas Tbk.

2.5 Penelitian Terdahulu

1. (Tessamonica, 2015) Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* (Kecurangan) (Studi Kasus Pada PT. ECOMPALINDO Bandung). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* (kecurangan). Metode penelitian yang digunakan adalah metode *explanatory* dengan pendekatan survei. Dimana variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari: pengendalian internal (X). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan *fraud* (kecurangan) (Y). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner yang

disebarkan ke PT. ECOMPALINDO yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pengujian Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier sederhana. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang karyawan yang bekerja di PT. ECOMPALINDO Bandung. Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (kecurangan). Akhir-akhir ini skandal akuntansi dan kecurangan korporasi meningkat secara signifikan dan kecurangan yang sering dan lazim terjadi adalah mengenai manipulasi laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh gaya operasi manajemen yang kurang bertanggungjawab dan kurangnya pemantauan kinerja kerja karyawan.

2. (Libramawan, 2014) judul penelitian Pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Survey pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia SO Bandung). Teknik penggunaan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus *Slovin* dikarenakan ukuran populasinya diketahui dengan pasti, dengan sampel yang diperoleh sebanyak 52 karyawan. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana pada taraf signifikansi sebesar 10%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) Ver. 19.00. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan *wishtleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan besar pengaruh penerapan *wishtleblowing system* dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap

pencegahan kecurangan sebesar 16,3%. Jadi semakin baik penerapan *Whistleblowing system* di suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pencegahan kecurangan.

3. (Permadi, 2016) Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus pada PT INTI (Persero)). Penelitian ini dilakukan di PT INTI (Persero). Populasi dalam penelitian ini adalah dewan direksi, tim pengadaan barang dan Satuan Pengawasan Intern. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan sampling jenuh berukuran 36 orang responden. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan pengujian hipotesis. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis regresi linier sederhana antara variabel independen dengan variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Pengujian statistik menggunakan analisis regresi linier sederhana. Penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan pengaruh sebesar 75,90% dengan arah positif, sedangkan sisanya 24,10% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
4. (Agusyani, 2016) Pengaruh *Whistleblowing System* Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah sampel 90 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 19 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara *Whistleblowing system* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud*. Secara simultan *Whistleblowing system* dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh simultan terhadap pencegahan *fraud*.

5. Imam Ghozali (2017). *The Effects Of The Whistleblowing System On Financial Statements Fraud: Ethical Behavior As The Mediators*. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem *whistleblowing* untuk pencegahan penipuan pelaporan keuangan. Menganalisis sistem *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan pelaporan keuangan melalui perilaku etis sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda, kesimpulan berikut dapat ditarik: Sistem Pelaporan Pengaruh positif pada pencegahan penipuan pelaporan keuangan dapat diterima. Sistem Pelaporan Pelanggaran Pengaruh Positif pada Kecenderungan Kecurangan finansial melalui Perilaku Etis tidak dapat diterima.

6. Mohammed Saleh (2016). *Effect Of Internal Control On Fraud Prevention In Maiduguri Manufacturing Industries Nigeria*. Efek penipuan dalam industri manufaktur tidak bisa terlalu ditekankan karena setiap kasus penipuan memiliki efek yang menghancurkan tidak hanya pada industri tetapi juga pada masyarakat luas dan seluruh ekonomi pada umumnya. Karena itu sangat penting bahwa industri manufaktur harus melakukan upaya bersama untuk mencegah timbulnya penipuan dan melakukan tindakan pengendalian yang memadai setiap saat. Peneliti melakukan studi kritis pada topik "efek kontrol internal pada pencegahan penipuan di industri manufaktur" sebuah studi kasus pabrik tepung Maiduguri, dengan maksud mencari tahu sejauh mana penipuan sebenarnya dicegah dalam industri manufaktur. Data yang diperlukan untuk pekerjaan penelitian ini diperoleh melalui kuesioner, wawancara lisan yang dilakukan di antara responden, buku teks, jurnal dari analisis data yang dilakukan, (*chi-square* dan *ANOVA*) temuan utama adalah; komposisi dan kebijakan manajemen yang tidak efisien telah menyebabkan peningkatan tingkat kecurangan yang disaksikan di industri manufaktur. Kurangnya pengawasan yang tepat telah menyebabkan sebagian besar penipuan yang disaksikan di industri. Kurangnya pelatihan, nepotisme dan staf operasi yang buruk, pemisahan tugas yang buruk, semuanya berdampak pada jumlah penipuan di industri manufaktur. Studi ini menemukan bahwa industri manufaktur telah melakukan semua tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penipuan dan bahwa setiap penipuan yang berhasil dalam

industri selalu melalui bantuan orang dalam. Rekomendasi lanjutan adalah sebagai berikut; industri manufaktur harus memastikan bahwa komposisi dan kebijakan manajemen mereka cukup efisien untuk mengendalikan dan memeriksa penipuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2013) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pengertian kuantitatif menurut (Sugiyono, 2017) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara *random*, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Widoyoko (2012), data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, atau dengan kata lain data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung seperti hasil pengisian angket (kuesioner).

2. Data Sekunder

Menurut Sunyoto, data sekunder merupakan data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan

mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk usulan penelitian ini adalah:

1. Penyebaran Kuesioner, hasil pengisian kuesioner dengan menggunakan 5 poin skala *likert*. Menurut (Rumengan, 2010) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena-fenomena atau gejala sosial yang terjadi.
2. Penelitian pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku literatur yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi, dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori dan teknik analisis dalam memecahkan masalah.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut (Sugiyono, 2013) “Populasi adalah objek-objek yang mempunyai kuantitatif tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Bagian

Keuangan pada PT. Bank Sinarmas, Tbk. cabang Tanjungpinang dan Batam yang berjumlah 39 orang dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Daftar Populasi Penelitian

No	Cabang Perusahaan	Jumlah Karyawan Bagian Keuangan
1	PT. Bank Sinarmas, Tbk. Cabang Tanjungpinang	21
2	PT. Bank Sinarmas, Tbk. Cabang Batam	18
Jumlah		39

Sumber : PT. Bank Sinarmas, Tbk. Cabang Batam dan Tanjungpinang, 2020

3.4.2 Sampel

Sampel menurut (Sugiyono, 2011) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT. Bank Sinarmas, Tbk. cabang Tanjungpinang dan Batam yang berjumlah 39 orang.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini bertujuan untuk menetapkan indikator dalam melihat variabel penelitian. Adapun operasional varaibel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen *Whistleblowing* (X1) dan Pengendalian internal (X2), untuk variabel dependen dapat diketahui yaitu Pencegahan *Fraud* (Y). Berikut penjelasan operasional variabel dalam penelitian ini :

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	No. Pernyataan
1	Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	Nurharyanto (2010) menambahkan bahwa penilaian risiko <i>fraud</i> yang efektif akan dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang tidak terdeteksi dan memperkuat kemampuan organisasi dalam mencegah dan mendeteksi <i>fraud</i> serta penyalahgunaan sebelum menjadi skandal bagi instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengorganisasikan penilaian risiko berdasarkan siklus tugas pokok dan fungsi instansi atau siklus kemungkinan terjadinya <i>fraud</i>. 2. Menetapkan unit dan lokasi untuk dinilai 3. Mengidentifikasi skema dan skenario potensi terjadinya <i>fraud</i> dan penyalahgunaan wewenang. 4. Menilai kemungkinan terjadinya dan tingkat signifikansi risiko. <p>Sumber : (Nurhayati, 2017)</p>	Likert	1 2 3 4
2	<i>Whistleblowing System</i> (X1)	<i>Whistleblowing</i> adalah cara yang tepat untuk mencegah dan menghalangi kecurangan, kerugian, dan penyalahgunaan Sumber : (Akmal, 2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anonimitas 2. Independensi 3. Akses yang mudah 4. Tindak Lanjut <p>Sumber : (Zimbelman, 2009)</p>	Likert	5 6,7 8 9
3	Pengendalian Internal (X2)	Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penaksiran Resiko 3. Aktivitas 	Likert	10 11 12

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	No. Pernyataan
		ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen	Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Sumber : (SPAP, 2011)		13 14
		Sumber : (Mulyadi, 2009)			

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berdasarkan Variabel X dan Variabel Y dengan menggunakan teknik pengolahan data. Pengolahan data menurut (Misbahuddin & Hasan, 2013) meliputi kegiatan:

1. *Editing*. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.
2. *Coding* (Pengkodean). *Coding* adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

3. Pemberian skor atau nilai dalam pemberian skor digunakan skala *Likert* yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor. Skala ini menggunakan 5 kategori:
 - a. Jawaban Sangat Setuju diberi bobot 5
 - b. Jawaban Setuju diberi bobot 4
 - c. Jawaban Ragu-Ragu diberi bobot 3
 - d. Jawaban Tidak Setuju diberi bobot 2
 - e. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi bobot 1
4. Tabulasi. Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan.

3.7 Metode Analisis Data

Terkait dengan sifat penelitian yaitu membuat analisis deskriptif dan analisis regresi. Analisis deskriptif merupakan pengumpulan, penyusunan, penyajian ringkasan data penelitian yang diringkas dengan baik dan teratur baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafik, sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan, Wijaya (2013). Analisis berupa penyajian data dengan tabel maupun distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang, penjelasan kelompok melalui *modus*, *mean*, dan variasi kelompok dengan rentang dan simpangan baku, digunakan untuk menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

Untuk mencari keterkaitan antara variabel-variabel pada model dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan SPSS Versi 24 dengan regresi linear untuk analisa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen, analisa regresi bertujuan untuk mengetahui koefisien korelasi, koefisien determinasi dan koefisien regresi.

3.7.1 Analisis Kualitas Data

3.7.1.1 Uji Validitas

Untuk mendukung analisis regresi perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan *item* kuesioner. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti, (Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini uji validitas akan dilakukan dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

Adapun metode yang digunakan pada program tersebut dalam menguji kevalidan kuesioner adalah dengan menggunakan metode *person correlation* yaitu dengan mengkorelasikan antar skor tiap item dengan skor total (Ghozali, 2011). Langkah selanjutnya adalah secara statistik, angka korelasi yang diperoleh dengan melihat tanda bintang pada hasil skor total, atau membandingkan dengan angka korelasi nilai r yang menunjukkan besar nilai kevalidan.

Menurut (Ghozali, 2011), metode pengambilan keputusan pada uji validitas biasanya ada dua model yaitu :

1. Menggunakan batasan r_{tabel} dengan signifikansi 0,05 dan diuji dua sisi dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Apabila $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, maka item kuesioner tersebut valid.
 - b. Apabila $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak valid.
2. Menggunakan batasan 0,3 hal ini menurut (Ghozali, 2011), artinya jika nilai korelasi lebih dari batasan yang ditentukan maka item kuesioner dianggap valid, sedangkan jika kurang dari batasan (0,3) maka item kuesioner dianggap tidak valid.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2011), uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Pada penelitian ini, uji reliabilitas alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Statistik ini berguna untuk mengetahui apakah alat pengukur tersebut *reliable*. Jika nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,6$ menunjukkan bahwa pengukur yang kita gunakan dianggap *reliable* artinya jawaban responden akan cenderung sama, walaupun diberikan kepada orang dan bentuk pertanyaan berbeda.

Terkait dengan sifat penelitian ini yaitu menggambarkan secara deskriptif dan pengujian hipotesis, maka data yang telah diolah, disajikan dalam bentuk tabel-tabel frekuensi, grafik dan menggunakan statistik analitik untuk selanjutnya dianalisis lebih lanjut. Untuk mencari keterkaitan antara variabel-variabel pada model dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif

dengan regresi linear untuk analisa variabel sebagai prediktor dan regresi linear berganda untuk analisa asosiasi variabel. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui koefisien korelasi, koefisien determinasi dan koefisien regresi.

3.7.2 Analisis Asumsi Klasik

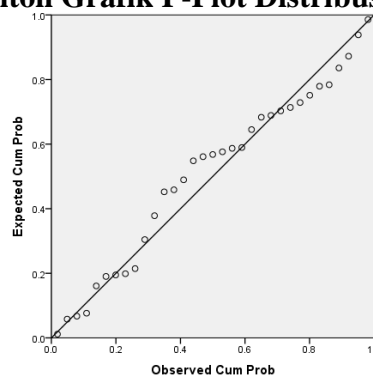
3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan mengamati penyebaran data pada sumbu diagonal suatu grafik. Menurut (Santoso, 2010) ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut contoh merupakan grafik normalitas *P-Plot* dengan distribusi data normal :

Gambar 3.1
Contoh Grafik P-Plot Distribusi Normal

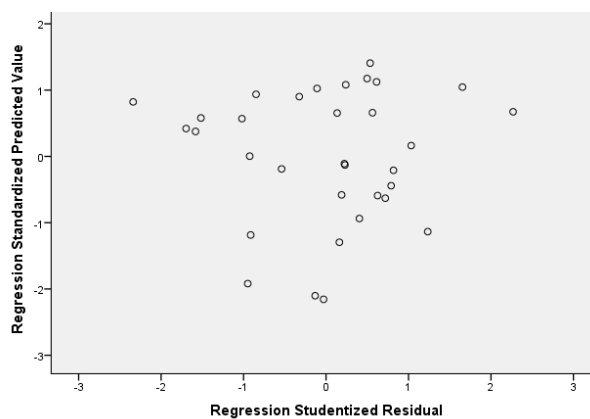


Sumber : Priyatno (2012)

3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2011) Uji Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji heteroskedastisitas dengan cara melihat pola titik-titik pada *scatterplots* regresi dengan analisis dasar. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas dan jika ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas tertentu seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y. Berikut merupakan contoh grafik scatterplot :

Gambar 3.1
Contoh Grafik P-Plot Distribusi Normal



Sumber : Priyatno (2012)

3.7.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2011) Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah

autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji *Durbin-Watson* (DWtest).

Pengambilan keputusan pada uji *Durbin Watson* adalah sebagai berikut:

- $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi
- $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi
- $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti

3.7.2.4 Uji Multikolinearitas

Menurut Priyatno (2012) Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Beberapa metode uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *Tolerance dan Inflation factor* (VIF) pada model regresi atau dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2). Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10 dan mempunyai angka Tolerance lebih dari 0,1.

3.7.3 Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Priyatno (2012) analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen yaitu *Whistleblowing* (X_1), Pengendalian Internal (X_2) terhadap satu variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud* (Y) dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Analisis ini untuk memprediksikan

nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing Y berhubungan positif atau negatif.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *Fraud*

X₁, = *Whistleblowing*

X₂ = Pengendalian Internal

a = Konstanta

b₁, = Koefisien regresi *Whistleblowing* (nilai peningkatan ataupun penurunan)

b₂ = Koefisien regresi Pengendalian Internal (nilai peningkatan ataupun penurunan)

ε = Nilai residu

3.7.4 Uji Hipotesis

Menurut (Ghozali, 2011), hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. Dalam penelitian yang menggunakan sampel, hipotesisnya menggunakan kata signifikan. Misalnya: “Ada pengaruh signifikan antara *Whistleblowing* dengan Pencegahan *Fraud*”. Signifikan ini mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada

sampel dapat diberlakukan pada populasi. Dalam hipotesis terdapat hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis alternative (Ha) yaitu sebagai berikut:

1. **Hipotesis nihil atau nol hipotesis (Ho)** adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya pengaruh antar variabel independen (*Whistleblowing System*, Pengendalian Internal) dengan variabel dependen (Pencegahan *Fraud*).
2. **Hipotesis alternative atau hipotesis kerja (Ha)** adalah hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh antar variabel independen (*Whistleblowing System*, Pengendalian Internal) dengan variabel dependen (Pencegahan *Fraud*).

3.7.4.1 Uji F (F-test)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu *Whistleblowing System* (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud* (Y) menurut (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi, yaitu: 0,005 ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Ho diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka Ho diterima dan HA ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (*Whistleblowing System*, Pengendalian Internal) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Pencegahan *Fraud*).

2. Ho ditolak jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$.

Jika $F \text{-hitung} > F \text{-tabel}$, maka Ho ditolak dan H_A diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (*Whistleblowing System*, Pengendalian Internal) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Pencegahan *Fraud*).

Dengan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel-1) dan df 2 ($n-k-1$, n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen).

3.7.4.2 Uji t (t-test)

Menurut (Ghozali, 2011), uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen yaitu (*Whistleblowing System*, Pengendalian Internal) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu (Pencegahan *Fraud*).

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi, yaitu: 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Ho diterima jika $-t \text{ table} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ table}$.
2. Ho ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ table}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ table}$.

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen)

3.7.4.3 Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali, 2011), analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini digunakan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu

menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan menjelaskan 100% variasi dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2017). *Survei Fraud di Indonesia. Indonesia Chapter#111*.
- Agusyani, N. K. S. (2016). *Pengaruh Whistleblowing System Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng)*.
- Akmal. (2009). *Pemeriksaan Manajemen Internal Audit* (2nd ed.). Jakarta: Indeks.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *No Title Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. (2014). Laporan Keuangan Bank. In *Manajemen Perbankan*.
- Kusuma, Nindy Inggar. (2014). Analisis sistem pengendalian internal persediaan. *Universitas Dian Nuswantoro Semarang*, 1–28.
- Libramawan. (2014). *Pengaruh Penerapan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Survey pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia SO Bandung)*.
- Loebbecke, Arens. (2012). *Auditing : Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lusiani, C. (2009). Audit IT Governance Kabupaten Sleman. *Jurnal Informatika Mulawarman*.
- Misbahuddin, & Hasan, I. (2013). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Edisi)*. Jakarta: Bumi Askara.
- Nurhayati. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Trias Politika*.
- Permadi. (2016). *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus pada PT INTI (Persero))*.
- Rumengan. (2010). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). Batam: Uniba Press.
- Rusnindita, K., Rosidi, -, & Baridwan, Z. (2017). Determinan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*. <https://doi.org/10.18382/jraam.v2i2.105>
- Santoso, S. (2010). *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*.

Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Setyawan, M. dan J. (2009). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, pp. 283–393. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. In *Alfabeta*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Susilawati, & Atmawinata, M. R. (2014). Pengaruh Profesionalisme Dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit: Studi Pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Etikonomi*. <https://doi.org/10.15408/etk.v13i2.1886>

Suwardjono. (2014). Teori akuntansi: perikayasaan pelaporan keuangan. In *BPFE- Yogyakarta*. <https://doi.org/2013>

Tessamonica. (2015). *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Kecurangan) (Studi Kasus Pada PT. ECOMPALINDO Bandung)*.

Widyaiswara, L. dan. (2010). International Financial Reporting Standards (IFRS). *Pusdiklatwas Dan Satgas IFRS Deputi Akuntan Negara BPKP*.

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Nanang Rahayu Widodo
Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan/11 juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl.Lembah Merpati KM.13 Arah Kijang

PENDIDIKAN

- SD Negeri 006 Tanjungpinang
- SMP Negeri 7 tanjung pinang
- Paket C (ILMU PENGETAHUAN SOSIAL)
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang